ORIGINAL RESEARCH
published: September, 2026
doi: 10.21070/kanal.v15i1.2016

Refiguration of Democratic Communication in the Digital Public Sphere
Refigurasi Komunikasi Demokratis dalam Ruang Publik Digital

Destita Mutiara[1], Muhammad Hafizh Renaldi[2]*
[1] Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Indonesia
[2] Magister Interdisciplinary Islamic Studies, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

OPEN ACCESS
ISSN 2541-2841 (online)
ISSN 2302-6790 (print)
Edited by:
Didik Hariyanto
**Correspondence:*
destitamutiara@umri.ac.id
Citation:
Destita Mutiara dan Muhammad Hafizh Renaldi. (2026). Refigurasi Komunikasi Demokratis dalam Ruang Publik Digital. 15(1)
Doi: 10.21070/kanal.v15i1.2016

Abstract
Social media has become an integral part of modern life and serves as a platform for social interaction, information dissemination, and public participation. The presence of social media also allows for active dialogue that can shape new currents in the field of digital activism. This study aims to explore the relationship between social media and the transformation of public space and understand its application to society. The study focuses on Instagram as a visual-based platform to analyze social media facilitating the expansion of public space into visual activism that transcends spatial, temporal, and geographical boundaries. The research findings obtained that @demokrasidigital seeks to create a future of hybrid activism by utilizing public space in new ways. This begins through online community connections, then in general the virtual world is able to attract more people. Digital democracy is not only a new phenomenon, but also makes communication more democratic by expanding the scope of its followers and this also proves that public discourse can occur in a virtual environment.
Keywords: *Digital Activism; Digital Democracy; Public Sphere; Social Media*

Abstrak

Media sosial telah menjadi bagian integral yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan modern dan berfungsi sebagai platform interaksi sosial, penyebaran informasi dan partisipasi publik. Kehadiran media sosial juga memungkinkan terjadinya dialog secara aktif yang mampu untuk membentuk arus baru dalam bidang aktivisme digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara media sosial dan transformasi ruang publik dan memahami implikasinya terhadap masyarakat. Penelitian berfokus pada Instagram sebagai platform berbasis visual untuk menganalisis media sosial memfasilitasi perluasan ruang publik menjadi aktivisme visual yang melampaui batas spasial, temporal dan geografis. Temuan penelitian didapatkan bahwa @demokrasidigital berupaya untuk melahirkan masa depan aktivisme yang dilakukan secara hybrid dengan memanfaatkan ruang publik dengan cara baru. Hal ini diawali melalui koneksi masyarakat secara online, kemudian secara umum dunia maya mampu untuk menarik lebih banyak orang. Demokrasi digital bukan hanya menjadi sebuah fenomena baru, namun juga membuat komunikasi menjadi lebih demokratis dengan memperluas cakupan pengikutnya dan ini juga

membuktikan bahwa wacana publik dapat terjadi dalam lingkungan virtual.
Kata Kunci: Aktivisme Digital; Demokrasi Digital; Media Sosial; Ruang Publik

PENDAHULUAN

Konsep ruang publik identik dengan Jürgen Habermas. Ruang publik merupakan arena bagi individu untuk dapat berkumpul, berdiskusi dan membentuk opini publik melalui proses deliberasi yang terbuka, dengan penekanan pada kesetaraan dan inklusivitas. Definisi Habermas terhadap ruang publik merupakan area di mana warga negara dapat berpartisipasi dalam diskusi rasional tanpa intervensi dari pihak luar (Habermas, 1962). Pada konteks media sosial, aplikasi seperti Instagram menyediakan ruang bagi penggunanya untuk dapat menyuarakan pendapat dan terlibat dalam diskusi publik. Studi-studi terdahulu (Habermas, 1962; Thompson, 1995; Castells, 2010; Fraser, 2024) telah meletakkan fondasi konseptual tentang ruang publik dan perubahannya, sementara kajian yang lebih baru menyoroti peran algoritma dalam aktivisme digital (Kwok & Keung Chan, 2024; Li et al., 2026). Namun, terdapat tiga celah yang belum banyak dijawab. *Pertama*, sebagian besar kajian bertumpu pada level konseptual sehingga praktik organisasi masyarakat sipil di Indonesia masih kurang terdokumentasi. *Kedua*, kajian algoritmik cenderung memisahkan analisis visibilitas daring dari praktik luring, padahal gerakan kontemporer semakin bersifat *hybrid*. *Ketiga*, belum banyak penelitian yang menghubungkan kerangka teoretis ruang publik (Habermas), *mediated publicness* (Thompson), dan *network society* (Castells) dalam satu pembacaan atas kasus empiris organisasi yang sengaja mengelola visibilitasnya di platform. Konsep Network Society Manuel juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman mengenai ruang publik. Pada masyarakat jaringan ruang publik tidak lagi terikat pada lokasi fisik melainkan beroperasi sebagai *space of flows* yang diartikan sebagai ruang informasi simbol dan kekuasaan mengalur secara cepat melalui jaringan komunikasi digital (Castells, 2010) sebagai bentuk demokrasi dan komunikasi demokratis yang baru di dunia digital.

Ruang publik menjadi salah satu bagian penting dari negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi akan berjalan dengan baik jika ruang publik yang ada pada suatu negara dapat berjalan setara (egaliter), dimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya (Littlejohn & Foss, 2009). Perubahan media sosial menjadi ruang publik terjadi secara signifikan dalam masyarakat modern. Perubahan ini memungkinkan individu atau kelompok melakukan interaksi, berbagi informasi dan membentuk opini kolektif yang menyebabkan perubahan pada struktur sosial dan budaya di masyarakat. Argument Thompson menyatakan bahwa media modern akan melahirkan hubungan baru antara individu dan masyarakat, dimana terjadi fluiditas informasi yang menyebabkan informasi tersebut tersebar secara cepat dan luas. Dengan demikian, media sosial akan memberikan kesempatan bagi individu maupun kelompok untuk terlibat dalam dialog sosial tanpa batasan fisik (Thompson, 1995).

Ruang Publik tidak lagi dipahami sebagai tempat fisik atau institusi tertentu melainkan sebagai kondisi sosial dimana sirkulasi opini masyarakat terbentuk secara berbas, kritis, tanpa paksaan dan inklusif. Namun di era transisi kapitalisme dari abad ke-19 ke-20, terjadi pergeseran pemaknaan terhadap ruang publik. Pada periode ini, ruang publik mulai dikuasai oleh kepentingan ekonomi dan politik, yang kemudian disebut sebagai "refeodalisasi". Media massa yang seharusnya menjadi saluran aspirasi dan opini masyarakat secara independen telah dikomersialisasi, sehingga dapat mengancam kelangsungan demokrasi (Setiawan, 2023).

Ruang publik bukan sekadar rang deliberasi diskursif melainkan arena tindakan politik (Space of apprearance) dimana individu-individu yang setara tidak hanya bertukar pendapat, tetapi juga betindak, keputusan kolektif membentuk relasi kekuasaan dan otoritas (Alexey, 2018). Menurut pengamatan Manuel Castells bahwa ruang publik dalam konteks teknologi digital merupakan arena yang akan terus berkembang, yang tidak hanya mengubah cara orang berinteraksi tetapi juga mempengaruhi struktur sosial dan politik di masyarakat modern (Castells, 2010).

Dalam penelitian ini, ruang publik digital menjadi tempat merefigurasi komunikasi demokrasi. Refigurasi komuniaksi adalah penataan atau pembentukan kembali pola komunikasi sebagai respon terhadap perubahan zaman, teknologi, masyarakat dan kebutuhan organisasi. Dalam era digital, refigurasi komunikasi ditandai dengan pergeseran dai komunikasi yang linier, satu arah, dan terpusat menuju komunikasi yang interaktif, partisipatif, jaringan, cepat dan dialogis. Perubahan komunikasi tidak hanya terjadi pada pesan atau media, tetapi juga dapat mengubah hubungan sosial dan ruang (Christmann et al., 2022)

Media sosial telah menjadi platform yang sangat melekat dalam realitas keseharian para pengguna. Seperti halnya konsep 'ruang kota cyber', tidak ada batasan yang tajam antara situs interaksi online dan offline (Lengauer, 2018). Media sosial kemudian merepresentasikan bentuk baru dari ruang publik ini, meskipun tantangan seperti disinformasi dan polarisasi sering mengganggu kualitas diskusi. Dengan adanya platform seperti Instagram, individu dapat dengan mudah menyuarakan pendapat, melakukan ekspresi diri, berkomuniikasi dalam diskusi yang lebih luas dan menciptakan dinamika baru dalam interaksi sosial

Transformasi ruang publik melalui media sosial juga terlihat jelas dalam fenomena aktivisme (Anggara & Pratama, 2019). Hal ini kemudian menunjukkan bahwa media sosial mempunyai potensi besar untuk memberdayakan individu dan kelompok dalam menyampaikan aspirasi serta berpartisipasi dalam proses demokratis. Akan tetapi, disisi lain penting untuk mempertimbangkan bahwa media sosial akan membawa tantangan tersendiri di tengah beragam penawaran peluang baru interaksi publik. Misalnya, masalah privasi dan keamanan informasi menjadi perhatian utama di era digital ini. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran akan risiko-risiko yang ada dan pemahaman mengenai fungsi media sosial sebagai ruang publik yang konstruktif (Robi'ah, 2020).

Media sosial menjadi sebuah platform baru dalam mengorganisir opini publik (Şen & Bolumu-Elazig, 2012). Selain itu, platform ini juga memungkinkan terjadinya dialog secara aktif yang mampu untuk membentuk arus baru dalam bidang aktivisme digital. Populasi pengguna internet di dunia

telah berkembang dari jutaan orang menjadi miliaran orang, sejak kemunculannya ke publik pada awal tahun 1999. Pada periode yang sama, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di seluruh dunia, yang kemudian melibatkan banyak aktor, diantaranya warga biasa, aktivis, perusahaan telekomunikasi, penyedia layanan, lembaga swadaya masyarakat hingga pemerintah (Shirky, 2011).

Media sosial menjadi fundamental dalam kehidupan modern yang tidak hanya berfungsi sebagai interaksi sosial, penyebaran informasi dan partisipasi publik tapi juga sebagai ruang relasi sosial yang dimedia secara intensif oleh teknologi komunikasi. *Meidated Publicnessd* disebut John B. Thompson dalam karyanya *The Media and Modernity A Social Theory Of The Media* dipahami sebagai kekuatan yang merekonfigurasi ruang publik yang memungkinkan tindakan dan wacana sosial dapat diakss oleh khalayak luas. *Mediated Publicness* menandai pergerseran interaksi tatap muka menuju interaksi yang dimediasi dengan arti visibibilitas, representasi dan sirkulasi makna tidak lagi dimaknai sebagai kehadiran fisik. Media sosial tidak sekadar alat komunikasi melainkan sebagai struktur sosial yang membentuk pola partisipasi, relasi kuasa dan dinamika diskursus dalam masyarakat digital. Maka dari itu, media sosial bukan hanya dijadikan sebagai sebuah alat, akan tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang mampu memberikan pengaruh terhadap dinamika sosial dan politik di era digital (Thompson, 1995).

Secara teoretis, media sosial dapat dipahami sebagai perluasan ruang publik digital (*digital public sphere*) yang menyediakan arena deliberatif bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan opini publik. Karakteristik internet yang bersifat interaktif, partisipatif, dan berbasis jaringan memungkinkan terbentuknya ruang-ruang diskursif baru yang relatif independen dari kontrol negara maupun dominasi korporasi media. Oleh karena itu, aktivisme digital tidak hanya merepresentasikan transformasi praktik komunikasi politik, tetapi juga menunjukkan pergeseran struktur kekuasaan dalam produksi dan distribusi informasi di masyarakat jaringan *(network society*).

Pada fase awal perkembangannya aktivisme digital umumnya diposisikan sebagai instrumen mobilisasi politik yang bertujuan memengaruhi kebijakan publik, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, serta memberikan tekanan terhadap aktor-aktor yang memiliki otoritas politik. Visibilitas dalam aktivisme digital pada dasarnya tidak berlangsung secara inheren maupun otomatis, melainkan dipengaruhi oleh mekanisme algoritmik yang mengatur produksi, kurasi, distribusi, dan keterpaparan suatu pesan dalam ekosistem platform. Kajian mengenai *algorithmically mediated activism* menunjukkan bahwa aktor gerakan sosial perlu memahami sekaligus beradaptasi dengan logika algoritmik untuk meningkatkan keterlihatan dan jangkauan Dalam perspektif lintas platform, karakteristik *affordances*, mekanisme *algorithmic curation*, struktur konektivitas, serta konfigurasi jaringan pada masing-masing platform turut membentuk tingkat visibilitas, resonansi, dan legitimasi suatu gerakan sosial (Li et al., 2026) Oleh karena itu, transformasi ruang publik pada era digital tidak semata-mata merepresentasikan perluasan akses terhadap komunikasi publik, tetapi juga menunjukkan perubahan fundamental dalam mekanisme produksi, seleksi, distribusi, visibilitas, dan sirkulasi wacana yang menentukan bagaimana suatu isu memperoleh perhatian dan menjadi bagian dari diskursus publik.

Pada dasarnya, aktivisme digital dirancang untuk melakukan perubahan hingga tekanan secara politik kepada para pemimpin yang berkuasa. Namun belakangan muncul jenis aktivisme digital baru dengan berusaha mengubah masyarakat secara langsung melalui kolaborasi individu atau kelompok tanpa bergantung pada infrastruktur pemerintah. Dalam hal ini, internet akan selalu dimungkinkan untuk membentuk komunitas baru dengan berbagai sumber daya. Perbedaannya hanya terletak pada bagaimana komunitas ini memanfaatkan seperangkat alat ideologis dan praktis yang kemudian menciptakan sebuah platform kerja sama untuk mewujudkan perubahan sosial (Bo'do, Siahaan, & Ida, 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat satu instagram yang berfokus pada demokrasi digital yaitu *@demokrasidigital*. Akun ini dimiliki oleh Non-Govermental Organization dengan slogan *Better Clicks Better World* sejak September 2024. Didalam bio instagramnya, akun ini menuliskan bahwa "Kami membangun pengetahuan tentang kekuatan algoritma, mempelajari bagaimana teknologi membentuk masyarakat dan maju dalam partisipasi yang bermakna dalam kehidupan demokratis" .Instagram ini dipilih menjadi objek kajian karena konsisten dalam membahas perihal demokrasi, interaksi yang berjalan di Instagram @demokrasidigital menjadi ruang baru di dunia digital perihal keterbukaan interaksi publik. Dalam perkembangannya, akun ini mempunyai 3.406 pengikut dan di setiap kontennya mendapatkan like dan komen dari netizen. Dalam tulisan ini, penulis akan mendeskripsikan fenomena media sosial dan transformasi ruang publik yang belum terpotret oleh beberapa studi sebelumnya (Habermas, 1962; Castells, 2010; Thompson, 1995; Alexey, 2018; Fraser, 2024). Titik tekan dalam studi ini lebih diarahkan melalui studi kasus sebagaimana dalam akun *@demokrasidigital* sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dengan tujuan menjaga kualitas demokrasi dan memiliki gagasan bahwa masa depan demokrasi melalui gerakan aktivisme dapat melalui gerakan online dan offline *(hybrid*).

Oleh karena itu, kemunculan media sosial sebagai ruang publik digital perlu dipahami secara kritis, tidak hanya sebagai medium yang memperluas partisipasi warga negara, tetapi juga sebagai ruang yang tetap rentan terhadap komodifikasi, dominasi algoritmik, dan berbagai bentuk relasi kuasa dalam ekosistem komunikasi digital

Pemahaman ini dilengkapi dengan konsep network society yang menekankan bahwa masyarakat modern terhubung melalui jaringan digital yang kompleks, Manuel Castells menjelaskan bahwa media sosial memungkinkan terjadinya fluiditas informasi dan menciptakan 'space of flows' di mana interaksi sosial tidak lagi terikat pada lokasi fisik. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai struktur yang mendukung partisipasi publik dan mobilisasi sosial. Dengan

demikian, media sosial menjadi sarana penting bagi individu untuk terlibat dalam isu-isu publik dan memperjuangkan kepentingan mereka (Castells, 2010).

Menurut Castells (2010), perkembangan teknologi digital telah merekonfigurasi ruang publik dari arena komunikasi yang berbasis lokasi fisik menjadi ruang jaringan (*networked public sphere*) yang memungkinkan pertukaran informasi, pembentukan opini, dan partisipasi warga berlangsung secara transnasional. Transformasi ini tidak hanya mengubah pola interaksi sosial, tetapi juga memengaruhi distribusi kekuasaan dan praktik demokrasi dalam masyarakat jaringan (*network society*) (Castells, 2010). Dalam konteks tersebut, media sosial berfungsi sebagai infrastruktur komunikasi yang memperluas akses masyarakat terhadap produksi dan diseminasi informasi, sekaligus menciptakan ruang deliberasi yang lebih terbuka dan partisipatif (Benkler, 2006; Papacharissi, 2015).

Media sosial kemudian menjadi representasi nyata dari ruang publik digital yang mempertemukan aktivitas daring dan luring dalam suatu ekosistem komunikasi yang saling terhubung (*hybrid public space*) (Lengauer, 2018). Platform seperti Instagram memungkinkan individu untuk mengekspresikan identitas, membangun jejaring sosial, memproduksi narasi alternatif, serta berpartisipasi dalam diskursus publik yang sebelumnya didominasi oleh institusi media konvensional (Jenkins, Ford, & Green, 2013; Papacharissi, 2015). Karakteristik interaktif dan partisipatif media sosial turut memperkuat kapasitas masyarakat dalam membangun tindakan kolektif, mengorganisasi komunitas, dan memobilisasi dukungan terhadap isu-isu sosial maupun politik (Castells, 2012; Bennett & Segerberg, 2013).

Meskipun demikian, potensi demokratis media sosial tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural. Fenomena disinformasi, polarisasi politik, *echo chamber*, dan dominasi algoritma platform berpotensi mengurangi kualitas deliberasi publik dan mempersempit keberagaman perspektif yang beredar di ruang digital (Sunstein, 2018; Pariser, 2011; Van Dijck, Poell, & de Waal, 2018). Oleh karena itu, media sosial perlu dipahami sebagai arena kontestasi yang secara simultan membuka peluang partisipasi publik sekaligus mereproduksi berbagai bentuk ketimpangan dan relasi kuasa dalam ekosistem komunikasi digital kontemporer (Fuchs, 2014; Couldry & Mejias, 2019).

Namun, meskipun media sosial menjanjikan beragam potensi untuk terciptanya ruang publik yang inklusif. Tentu ada beberapa yang perlu diperhatikan, Media sosial saat ini sering kali terisi dengan konten yang tidak akurat, yang dapat berdampak pada rusaknya kualitas diskusi publik (Robi'ah, 2020). Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat agar mempunyai literasi media yang baik untuk dapat membedakan antara informasi yang akurat dan tidak akurat.

Penerapan media sosial sebagai ruang publik tentu menjadi bahan kajian yang menarik, menurut Diaz Romero media sosial mempunyai peran penting sebagai medium masyarakat dalam partisipasi secara politik, berorganisasi, menggerakkan massa demonstrasi, maupun aktivisme sosial lainnya dari lingkup lokal hingga global. Selain itu, media sosial berpengaruh pada peningkatan kapasitas media konvensional karena digitalisasi yang ada membuat proses dialogis di masyarakat menjadi semakin cepat dan luas (Romero, 2016) (Setiawan, 2023).

Instagram memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam diskusi ini dengan cara yang lebih visual dan menarik, menjadikannya alat yang efektif untuk aktivisme. Masyarakat jaringan selalu menginginkan interaksi yang cepat dan dinamis di antara individu melalui teknologi informasi. Melalui penggunaan hashtag dan fitur berbagi di Instagram, pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi dan terlibat dalam diskusi global tentang isu-isu sosial. Inilah yang kemudian melahirkan ruang publik inklusif dan interaktif dibandingkan dengan media tradisional, di mana suara-suara tertentu sering kali terpinggirkan.

Secara keseluruhan, transformasi ruang publik melalui media sosial seperti Instagram akan berdampak besar bagi perubahan sosial, karena melalui interaksi dan partisipasi masyarakat pada diskusi publik, Instagram memproses informasi dari hasil pembentukan opini bersama dan mobilisasi kolektif. Oleh karena itu kajian ini berupaya menganalisis bagaimana media sosial *@demokrasidigital* mengubah ruang publik dan mengapa bisa berubah. Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara media sosial dan transformasi ruang publik dan memahami implikasinya terhadap masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivis-kritis, yang bertujuan untuk memahami bagaimana aktivisme digital dikonstruksi, direpresentasikan, dan dimediasi melalui konten media sosial Instagram sebagai ruang publik visual digital pada akun Instagram *@demokrasigital.* Pendekatan ini dipilih karena aktivisme digital tidak hanya beroperasi sebagai praktik komunikasi teknologis, tetapi sebagai proses diskursif yang melibatkan produksi makna, artikulasi ideologi, serta relasi kuasa dalam masyarakat digital. Penelitian berfokus kasus pada akun instagram *@Demokrasidigital* yang konsisten memproduksi diskursus konten di tema isu sosial politik dan demokrasi. Akun ini diposisikan sebagai representasi ruang publik visual yang teralgorimisasi (*Algorithmically mediated visual public sphere*) wacana demokrasi direpresentasikan melalui proses penyederhanaan, visualisasi dan sirkulasi konten yang mengikuti logika estetika serta mekanisme algortimik intasgram. Objek penelitian diambil pada media sosial instagram @demokrasidigital dengan unit analisis yang meliputi elemen visual, teks pendukung dan interaksi audiense yang tercermin dalam kolom komentar (*engagement)*. Data dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* pada unggahan dengan kriteria unggahan yang mengandung narasi kepentingan publik, kritik sosial atau politik, serta ajakan reflektif maupun partisipatif terkait isu demokrasi.

Data primer diperoleh melalui dokumentasi digital berupa arsip unggahan, tangkapan layar konten visual, caption, serta komentar audiens. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari jurnal ilmiah, buku, dan publikasi akademik yang relevan dengan kajian aktivisme digital, ruang publik digital, dan komunikasi visual

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan terhadap unggahan *@demokrasidigital* dalam periode Desember 2024 - Desember 2025 dan pemilihan konten berdasarkan isi konten dan narasi yang membangun. Keterbatasan melihat secara terbuka jumlah like dan *engangement* membuat peneliti memilih 4 konten *representative* berdasarkan diskursus narasi, kegiatan dan tipografi konten.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis konten kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Untuk memperoleh pembacaan yang sistematis dan mendalam, analisis konten difokuskan pada tiga kategori utama, yaitu visual, narasi, dan ideologi.

Pertama, analisis visual diarahkan untuk mengkaji bagaimana elemen visual digunakan dalam membingkai isu demokrasi. Indikator analisis visual meliputi bentuk visual (ilustrasi, infografik, tipografi), komposisi warna, simbol visual, gaya desain, serta tingkat simplifikasi isu. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana visual berfungsi sebagai medium persuasi, pemicu afeksi, dan alat penyederhanaan wacana kompleks dalam aktivisme digital *@demokrasidigital*. Kedua, analisis narasi difokuskan pada cara pesan aktivisme dirangkai melalui caption dan teks pendukung.

Indikator analisis narasi mencakup tema utama isu, pola framing (diagnostik, prognostik, dan motivasional), penggunaan diksi emosional atau rasional, serta bentuk ajakan partisipasi publik (*call to action*). Analisis ini digunakan untuk memahami bagaimana *@demokrasidigital* membangun alur cerita aktivisme yang mampu menghubungkan isu struktural dengan pengalaman keseharian audiens. Ketiga, analisis ideologi diarahkan untuk mengidentifikasi nilai, posisi politik, dan orientasi normatif yang mendasari konten aktivisme digital. Indikator analisis ideologi meliputi representasi relasi kuasa, posisi terhadap negara dan warga, pemaknaan demokrasi, serta narasi resistensi atau kritik terhadap praktik kekuasaan. Analisis ini memungkinkan peneliti membaca bagaimana aktivisme digital di *@demokrasidigital* tidak bersifat netral, melainkan merefleksikan konstruksi ideologis tertentu dalam ruang publik digital. Tahap akhir analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan dari ketiga kategori tersebut ke dalam kerangka teoretis mengenai ruang publik digital, masyarakat jaringan, dan *mediatization of activism.* Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada deskripsi konten, tetapi menghasilkan pemahaman kritis mengenai bagaimana Instagram, melalui akun *@demokrasidigital*, berfungsi sebagai ruang publik visual yang membentuk, menegosiasikan, dan menyirkulasikan wacana demokrasi di era digital. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi teori dan sumber, serta melakukan pembacaan data secara berulang dan reflektif guna menjaga konsistensi interpretasi dan meminimalkan bias peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Akun *@demokrasidigital*

@demokrasidigital adalah organisasi non-pemerintah (NGO) dengan slogan *Better Clicks, Better World*. Organisasi ini menyatakan empat area fokus, yaitu hak dan kebebasan digital, platform digital dan integritas informasi, teknologi dan tata kelola, serta teknologi baru dan masyarakat. Misi yang dinyatakannya adalah memperjuangkan prinsip demokrasi di dunia digital maupun dunia nyata melalui penelitian, kolaborasi, dan keterlibatan sipil. Rumusan ini sejalan dengan gagasan hibrida yang diangkat pada bagian Pendahuluan, yakni demokrasi yang dijaga melalui gerakan daring dan luring.

Dari unggahan pada periode penelitian, dipilih empat konten yang berkaitan dengan edukasi demokrasi dan kegiatan organisasi (Tabel 1; Gambar 1 sampai Gambar 4). Karena jumlah suka dan keterlibatan tidak dapat dilihat secara terbuka, pemilihan mengikuti kriteria pada bagian Metode, yakni keterwakilan diskursus narasi, kegiatan, dan tipografi konten. Dua konten mewakili kegiatan organisasi (peluncuran dan seri Literasi Algoritma), satu konten mewakili diskursus narasi tentang isu politik digital (peran *influencer*), dan satu konten mewakili penggunaan tipografi sebagai respons atas peristiwa politik (#PeringatanBerduka). Konten terakhir bukan konten edukasi dalam arti sempit. Konten ini diperlakukan sebagai kasus pembanding untuk melihat bagaimana akun mengubah register visual dan naratifnya ketika isu bergeser dari edukasi ke duka. Jumlah konten sengaja dibatasi agar setiap konten dapat dibaca secara mendalam menurut seluruh indikator. Meskipun ketiga kategori dibaca pada semua konten, kolom terakhir Tabel 1 menandai kategori yang paling menonjol pada masing-masing konten.

Tabel 1. Konten *@demokrasidigital* yang Dianalisis (Desember 2024–Desember 2025)

Gambar	Konten	Dasar Pemilihan
Gambar 1	Dokumentasi peluncuran Demokrasi Digital (foto kegiatan 7 Desember 2024; carousel)	Kegiatan luring dengan analisis narasi
Gambar 2	Poster dan caption “Literasi Algoritma: Hidup kok, diatur algoritma?” (School of Democracy bersama Ruang Literasi Kaliurang, Yogyakarta (23 Desember 2024)	Kegiatan edukasi dengan analisis ideologi
Gambar 3	“The Role of Influencers in Democratic Backsliding” (carousel; ilustrasi) 22 Maret 2024	Kegiatan diskusi, analisis narasi.
Gambar 4	#PeringatanBerduka (grafis tipografis) Agustus 2025	Kegiatan tipografi sebagai kasus pembanding

Sumber: pengamatan unggahan Instagram *@demokrasidigital* oleh penulis.



Gambar 1. Dokumentasi peluncuran Demokrasi Digital



Gambar 2. Poster Literasi Algoritma



Gambar 3. *The Role of Influencers in Democratic Backsliding*



Gambar 4. #PeringatanBerduka

Sumber: tangkapan layar unggahan Instagram *@demokrasidigital* (Desember 2024–Agustus 2025).

Tabel 2. Analisis Visual per Indikator

Konten	Bentuk Visual	Komposisi Warna	Simbol Visual	Gaya Desain	Simplifikasi Isu
Gambar 1: Peluncuran	Foto dokumenter tanpa teks tambahan	Warna alami ruang acara; warna organisasi hanya pada spanduk	Spanduk berlogo; peserta duduk melingkar; pembicara berdiri berjajar	Dokumentasi komunitas yang hangat dan informal	Rendah pada visual; makna dibawa caption
Gambar 2: Literasi Algoritma	Poster infografik acara; tipografi dominan	Merah muda, merah tua, hijau tosca, putih	Foto pembicara berbingkai lengkung dengan label peran; kode QR; ikon kalender dan lokasi	Kolase scrapbook: tekstur kertas sobek, latar berpetak, label bertumpuk	Sedang: isu dipadatkan menjadi satu pertanyaan, sisanya informasi praktis
Gambar 3: Peran Influencer	Ilustrasi digital dengan judul tipografis dwibahasa	Latar hijau tosca, label merah, aksen merah muda pada ikon	Ikon suka dan platform; megafon; kotak suara "VOTE"; bayangan tangan menunjuk	Sinematik dan dramatis: ilustrasi di dalam layar tablet yang dipegang tangan monokrom	Tinggi: pengaruh influencer pada pilihan politik menjadi satu adegan
Gambar 4: #PeringatanBerduka	Grafis minimalis berbasis lambang dan tipografi	Hitam dan putih; keluar dari palet organisasi	Lambang Garuda Pancasila; tulisan "PERINGATAN BERDUKA"	Muram dan minimalis: tekstur kasar bergaya glitch, huruf bergaya piksel	Paling tinggi: peristiwa korban jiwa menjadi satu lambang dan satu frasa pada sampul

Analisis Visual

Tabel 2 memetakan keempat konten menurut lima indikator visual, yaitu bentuk visual, komposisi warna, simbol visual, gaya desain, dan tingkat simplifikasi isu.

Keempat konten memakai bentuk visual yang berbeda untuk fungsi yang berbeda. Gambar 1 berupa foto dokumenter tanpa teks tambahan: sekitar lima puluh peserta duduk melingkar di ruang acara, dengan spanduk berlogo organisasi di sisi ruangan dan pembicara berdiri berjajar. Foto semacam ini memosisikan konten sebagai bukti kegiatan tatap muka. Foto yang memuat banyak wajah juga selaras dengan temuan Bakhshi et al. (2014) bahwa foto berwajah cenderung memperoleh lebih banyak keterlibatan di Instagram, meskipun penelitian ini tidak membandingkan jumlah keterlibatan. Gambar 2 berupa poster infografik dengan tipografi kapital tebal "LITERASI ALGORITMA", kutipan bergaya percakapan "Hidup kok, diatur algoritma?", foto pembicara berbingkai lengkung berlabel peran, serta informasi praktis

berupa tanggal, lokasi, kode QR, dan kuota "50 Limited Seats!". Gambar 3 berupa ilustrasi digital: warga mengantre ke kotak suara bertulis "VOTE" sambil menunduk pada ponsel, dikelilingi ikon suka, ikon platform, dan megafon, dengan judul dwibahasa. Gambar 4 berlatar hitam dengan lambang Garuda Pancasila putih bertekstur kasar dan tulisan "PERINGATAN BERDUKA" berhuruf bergaya piksel.

Pada komposisi warna, Gambar 2 dan Gambar 3 memakai kombinasi merah, merah muda, dan hijau tosca yang konsisten dengan identitas visual organisasi, sehingga mudah dikenali di lini masa. Gambar 1 didominasi warna alami ruang acara, dan warna organisasi hanya hadir pada spanduk. Gambar 4 keluar sepenuhnya dari palet tersebut dan memakai hitam-putih. Perpindahan ini menandai pergeseran register dari edukatif-ramah menjadi muram.

Simbol paling figuratif ada pada Gambar 3: ikon suka dan platform mewakili logika media sosial, megafon mewakili penyebaran pengaruh, kotak suara mewakili pemilu, dan bayangan tangan mewakili kendali yang tidak bernama. Pada Gambar 2, foto pembicara berlabel jabatan berfungsi sebagai penanda otoritas, sedangkan kode QR berfungsi sebagai penanda ajakan bertindak. Pada Gambar 4, lambang negara menjadi satu-satunya simbol, sehingga duka dikaitkan dengan identitas kebangsaan. Tingkat simplifikasi isu meningkat seiring beban emosionalnya: isu algoritma dipadatkan menjadi satu pertanyaan retoris (Gambar 2), pengaruh influencer menjadi satu adegan metaforis (Gambar 3), dan peristiwa korban jiwa menjadi satu lambang dan satu frasa (Gambar 4). Simplifikasi ini memudahkan keterbacaan dan penyebaran, tetapi juga memuat pembingkaian tertentu, misalnya pemilih digambarkan pasif dan kuasa diwakili bayangan yang tidak bernama.

Gambar 3 dan Gambar 4 paling jelas masuk kategori visual karena maknanya dibangun terutama oleh ilustrasi, simbol, dan perubahan gaya, sedangkan caption masing-masing hanya terdiri dari satu hingga dua kalimat. Pada Gambar 3, indikator simbol visual dan simplifikasi isu paling kuat. Pada Gambar 4, indikator gaya desain dan komposisi warna paling kuat.

Analisis Narasi

Tabel 3 memetakan keempat konten menurut indikator narasi, yaitu tema utama isu, pola framing (diagnostik, prognostik, dan motivasional), diksi emosional atau rasional, dan bentuk ajakan partisipasi publik (*call to action*). Keempat konten berada di bawah payung hubungan antara demokrasi dan teknologi, tetapi berangkat dari tema yang berbeda. Gambar 1 menyorot partisipasi bermakna di era algoritma sekaligus merayakan peluncuran organisasi. Gambar 2 mengangkat pengetahuan tentang prinsip dan praktik demokrasi di era digital bagi mahasiswa di Yogyakarta dan sekitarnya. Gambar 3 menyoroti peran influencer dalam membentuk opini politik. Gambar 4 merespons satu korban jiwa dan menjadi satu-satunya konten yang berangkat dari peristiwa politik langsung, bukan dari isu teknologi. Konteks demonstrasi pada Gambar 4 tidak disebut pada caption, tetapi tampak dari komentar audiens.

Framing diagnostik cenderung tidak diuraikan dalam caption, melainkan dibawa oleh judul pada visual. Frasa "Hidup kok, diatur algoritma?" (Gambar 2) dan "Hari-hari pilihan politik dibayangi oleh pendapat influencer" (Gambar 3) merumuskan masalah, sedangkan caption Gambar 1 dan Gambar 3 hanya menyebut kondisi secara umum. Pada Gambar 4, diagnosis berupa kematian antarsesama warga ("satu anak bangsa tewas di tangan anak bangsa lainnya") tanpa menyebut pihak yang bertindak. Pertanyaan pada Gambar 3 ("bagaimana kita memastikan mereka berbagi konten yang akurat dan bertanggung jawab?") juga memakai kata ganti kolektif "kita" tanpa menyebut pihak yang bertanggung jawab. Framing prognostik berbentuk penyediaan pengetahuan melalui kegiatan (Gambar 1 dan Gambar 2) atau pertanyaan terbuka (Gambar 3),dan solusinya tidak dirinci. Gambar 4 tidak memuat prognosis. Framing motivasional berupa ungkapan syukur dan semangat kolektif (Gambar 1), ajakan menanti kegiatan baru (Gambar 2), undangan menanggapi (Gambar 3), dan rasa kebersamaan (Gambar 4).

Tabel 3. Analisis Narasi per Indikator

Indikator	**Gambar 1: Peluncuran**
Tema utama	Partisipasi bermakna di era algoritma; syukur atas peluncuran organisasi
Framing diagnostik	Lemah; masalah tersirat pada frasa "era algoritma kini"
Framing prognostik	"Interaksi yang sehat antara demokrasi dan teknologi"; program lanjutan
Framing motivasional	"Euforia", "energi positif", janji menjaga energi tersebut
Diksi	Dominan emosional-afektif
Call to action	Tidak langsung: "Nantikan program-program seru lainnya"
Indikator	**Gambar 2: Literasi Algoritma**
Tema utama	Pengetahuan tentang prinsip dan praktik demokrasi di era digital bagi mahasiswa
Framing diagnostik	Tersirat pada judul visual "Hidup kok, diatur algoritma?"; caption tidak menguraikan masalah
Framing prognostik	Pemberian pengetahuan melalui kegiatan edukasi (School of Democracy)
Framing motivasional	"Siap menantikan gebrakan baru dari kami?"; "Bergabunglah"
Diksi	Campuran informatif dan promosional
Call to action	Langsung dan konkret: pendaftaran melalui kode QR, kuota 50 kursi, tanggal, tempat, insentif
Indikator	**Gambar 3: Peran Influencer**
Tema utama	Peran influencer dalam membentuk opini politik
Framing diagnostik	Tegas pada visual ("dibayangi oleh pendapat influencer"); caption hanya menyebut peran influencer yang semakin besar
Framing prognostik	Berbentuk pertanyaan: bagaimana memastikan konten influencer akurat dan bertanggung jawab
Framing motivasional	"Thoughts? Asking for a friend!"
Diksi	Rasional-normatif dengan penutup santai
Call to action	Terbuka dan retoris: pertanyaan kepada audiens

Indikator	Gambar 4: #PeringatanBerduka
Tema utama	Duka atas satu korban jiwa
Framing diagnostik	Kematian antarsesama warga (“anak bangsa”), tanpa penyebutan pelaku
Framing prognostik	Tidak ada; hanya pernyataan bahwa kondisi ini bukan yang didambakan
Framing motivasional	Penggunaan “kita” dan tagar solidaritas
Diksi	Sangat emosional dan singkat
Call to action	Simbolik: tagar #PeringatanBerduka

Diksi bergerak dari emosional ke rasional menurut fungsi konten. Caption Gambar 1 paling emosional (“euforia dan memori terus membekas di hati”, “dari lubuk hati terdalam”). Diksi rasional-normatif muncul pada “partisipasi bermakna”, “interaksi yang sehat”, dan “akurat dan bertanggung jawab”. Gambar 2 memadukan diksi informatif (“prinsip”, “praktik”, “wawasan”) dengan istilah promosional berbahasa Inggris (“Proudly present”, “Limited Seats”, “Benefit”). Gambar 3 ditutup dengan register percakapan santai (“Thoughts? Asking for a friend!”), yang memosisikan akun sebagai teman diskusi dan fasilitator, tetapi pertanyaan dan bingkai masalahnya tetap ditentukan akun. Gambar 4 memakai diksi paling singkat dan paling emosional (“tewas”, “dambakan”, “berduka”) tanpa unsur argumentatif.

Bentuk ajakan partisipasi bergerak dari konkret ke simbolik. Gambar 2 memuat ajakan paling operasional: pendaftaran melalui kode QR dan tautan, batas 50 kursi, serta insentif berupa makan siang dan e-sertifikat. Gambar 1 mengajak secara umum untuk menantikan program berikutnya. Gambar 3 meminta tanggapan melalui pertanyaan terbuka tanpa menetapkan bentuk partisipasi lanjutan. Gambar 4 mengajak lewat penanda solidaritas berupa tagar. Urutan serupa, yakni pengakuan atas sisi positif atau niat baik, penanda kontras (“namun”, “di sisi lain”), dan penutup berupa imbauan atau pertanyaan reflektif, juga tampak pada beberapa caption lain di luar keempat konten yang dibaca sebagai pembanding.

Gambar 1 paling jelas masuk kategori narasi karena maknanya dibawa hampir seluruhnya oleh caption panjang yang berstruktur cerita (peristiwa, kendala hujan, pembicara, ucapan terima kasih, janji program), sedangkan visualnya berupa foto tanpa teks tambahan. Gambar 2 dan Gambar 3 juga kaya indikator narasi, terutama pada framing prognostik dan *call to action*, tetapi lebih menonjol masing-masing pada kategori ideologi dan visual.

Analisis Ideologi

Tabel 4 memetakan keempat konten menurut indikator ideologi, yaitu representasi relasi kuasa, posisi terhadap negara dan warga, pemaknaan demokrasi, serta narasi resistensi atau kritik terhadap praktik kekuasaan. Pembacaan ini bersifat interpretatif dan setiap klaim diikatkan pada elemen yang tampak pada konten.

Tabel 4. Analisis Ideologi per Indikator

Indikator	Gambar 1: Peluncuran
Relasi kuasa	Jejaring komunitas, akademisi, praktisi, dan publik; tidak ada aktor berkuasa yang disebut
Posisi terhadap negara	Tidak disebut
Posisi terhadap warga	Peserta dan pendukung komunitas
Pemaknaan demokrasi	“Partisipasi bermakna”; “interaksi yang sehat antara demokrasi dan teknologi”
Resistensi dan kritik	Tidak ada pada caption; kritik muncul dari komentar audiens
Indikator	**Gambar 2: Literasi Algoritma**
Relasi kuasa	Lembaga negara sebagai pemberi legitimasi (Ketua Komisi XIII DPR RI sebagai keynote speaker; staf khusus Wakil Ketua MPR RI sebagai panelis); algoritma sebagai kuasa abstrak
Posisi terhadap negara	Kooperatif: lembaga negara sebagai mitra kegiatan
Posisi terhadap warga	Mahasiswa sebagai penerima pengetahuan
Pemaknaan demokrasi	Prinsip dan praktik yang perlu dipelajari
Resistensi dan kritik	Tidak ada resistensi; kritik tersirat pada judul visual
Indikator	**Gambar 3: Peran Influencer**
Relasi kuasa	Kuasa dipegang influencer dan logika platform; elite politik tidak disebut maupun digambarkan
Posisi terhadap negara	Tidak disebut; persoalan dialamatkan pada influencer
Posisi terhadap warga	Pemilih yang pasif dan mudah tergiring (menunduk pada ponsel)
Pemaknaan demokrasi	Pilihan politik yang perlu bebas dari pengaruh yang tidak akurat
Resistensi dan kritik	Kritik moral-normatif terhadap influencer, bukan terhadap struktur kuasa

Indikator	Gambar 4: #PeringatanBerduka
Relasi kuasa	Kuasa tampak lewat akibatnya (korban jiwa); pelaku tidak disebut
Posisi terhadap negara	Ambigu: lambang negara dipakai untuk berduka tanpa menunjuk institusi
Posisi terhadap warga	Korban dan sesama anak bangsa; "kita" sebagai komunitas duka
Pemaknaan demokrasi	Nilai kebangsaan dan kemanusiaan
Resistensi dan kritik	Nada kritik kuat tetapi tanpa alamat; resistensi eksplisit muncul pada komentar

Relasi kuasa direpresentasikan secara selektif. Pada Gambar 2, kuasa negara hadir sebagai bagian dari kegiatan: Ketua Komisi XIII DPR RI menjadi *keynote speaker* dan staf khusus Wakil Ketua MPR RI menjadi panelis, bersama peneliti Center for Digital Society dan moderator dari internal organisasi. Pada Gambar 3, relasi kuasa direpresentasikan melalui influencer dan logika platform, yang divisualkan dengan ikon suka, megafon, dan bayangan tangan menunjuk dari atas, sedangkan elite politik tidak muncul sebagai pihak yang membentuk opini. Pada Gambar 4, kuasa muncul dalam bentuk akibatnya, yakni korban jiwa, sementara pelakunya tidak disebut. Gambar 1 menampilkan relasi kuasa dalam bentuk jejaring komunitas, akademisi, dan praktisi tanpa menyebut aktor berkuasa tertentu.

Terhadap negara, wacana tampak kooperatif. Kehadiran pejabat DPR dan MPR pada Gambar 2 menempatkan lembaga negara sebagai mitra dan sumber legitimasi kegiatan, bukan sebagai objek kritik. Pada Gambar 4, lambang negara dipakai untuk menyatakan duka tanpa menunjuk institusi yang bertanggung jawab. Terhadap warga, posisi yang muncul adalah penerima pengetahuan (Gambar 2), pemilih yang rentan tergiring (Gambar 3), dan sesama anak bangsa yang berduka (Gambar 4). Visual Gambar 3 menggambarkan warga menunduk pada ponsel saat mengantre ke kotak suara, sehingga kerentanan dialamatkan pada perilaku bermedia warga.

Demokrasi cenderung dimaknai sebagai kondisi informasi dan partisipasi yang sehat, tampak pada frasa "partisipasi bermakna di era algoritma" dan "interaksi yang sehat antara demokrasi dan teknologi" (Gambar 1) serta "prinsip dan praktik demokrasi di era digital" (Gambar 2). Pada Gambar 3, demokrasi dikaitkan dengan kualitas pilihan politik yang tidak dibayangi pendapat influencer. Pada Gambar 4, demokrasi dimaknai sebagai nilai kebangsaan dan kemanusiaan yang ternoda oleh kekerasan ("bukan bulan kemerdekaan yang kita dambakan"). Pemaknaan ini cenderung edukatif-normatif, bukan prosedural dan bukan berbasis tuntutan struktural.

Narasi resistensi eksplisit tidak ditemukan pada caption keempat konten. Kritik hadir secara tersirat dan terarah pada aktor non-negara, yakni algoritma (Gambar 2) dan influencer (Gambar 3). Pada Gambar 4, nada kritik paling kuat tetapi tidak beralamat. Resistensi yang lebih eksplisit justru muncul pada komentar audiens (dibahas pada bagian Interaksi Audiens). Temuan ini terbatas pada empat konten terpilih.

Gambar 2 paling jelas masuk kategori ideologi karena komposisi pembicaranya (pejabat DPR dan MPR, peneliti, dan moderator internal) memperlihatkan posisi organisasi terhadap negara tanpa perlu diuraikan dalam caption. Gambar 4 juga kuat secara ideologis karena penghilangan pelaku dan pemakaian lambang negara mengandung posisi politik yang dapat dibaca.

Representasi Konten *@demokrasidigital* sebagai Perpanjangan Ruang Demokrasi Baru

Berdasarkan temuan dan dialog teoretis di atas, konten *@demokrasidigital* dapat dibaca sebagai perpanjangan ruang demokrasi, yakni memperluas tempat dan cara wacana demokrasi dihadirkan, bukan menggantikan arena demokrasi yang sudah ada. Kata "baru" di sini dibatasi pada tiga hal. Pertama, akses dan hubungan daring-luring: peluncuran (Gambar 1) dan seri Literasi Algoritma (Gambar 2) menunjukkan bahwa unggahan berfungsi sebagai arsip, promosi, dan pintu pendaftaran bagi forum tatap muka di Jakarta dan Yogyakarta, sedangkan permintaan agar kegiatan digelar di Surabaya menunjukkan bahwa audiens membaca akun sebagai penyelenggara program yang dapat dijangkau di luar kota asal kegiatan. Hal ini selaras dengan gambaran ruang publik hibrida yang menghubungkan aktivitas daring dan luring (Lengauer, 2018). Kedua, format: isu yang kompleks, seperti algoritma, pengaruh influencer, dan duka, dipadatkan menjadi poster, ilustrasi, dan grafis yang mudah dibagikan. Ketiga, jejaring: komentar audiens menghubungkan konten dengan aktor lain, baik organisasi hak asasi manusia internasional maupun media nasional.

Berdasarkan keempat konten, sejauh ini *@demokrasidigital* mengubah ruang publik terutama pada tataran penyajian dan pemicuan wacana, sedangkan deliberasi yang lebih kritis tampak pada komentar audiens dan belum pada akun. Alasan perubahan tersebut tampak berkaitan dengan tiga hal, yaitu format yang mengikuti logika platform (Li et al., 2026; Van Dijck et al., 2018), jejaring institusional akun, dan pilihan ideologis yang kooperatif terhadap negara. Penjelasan ini merupakan tafsiran atas empat konten terpilih sehingga belum dapat digeneralisasi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Jumlah suka dan keterlibatan tidak dapat dilihat secara terbuka, komentar yang dianalisis terbatas pada yang teramati, dan balasan akun tidak tersedia. Dengan demikian, temuan ini belum dapat dibaca sebagai bukti bahwa ruang tersebut menghasilkan deliberasi yang berkelanjutan atau tindakan kolektif. Penelitian lanjutan perlu memuat data keterlibatan, balasan akun, serta perspektif audiens dan pengelola akun.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa adanya keterkaitan antara ruang publik dan media sosial dalam membentuk gerakan aktivisme baru. Namun demikian, studi ini juga menunjukkan bahwa ruang publik digital berbeda dari model ruang publik ideal yang dibayangkan Habermas.

Hasil analisis visual, akun ini menyederhanakan isu yang kompleks melalui infografik berpalet merah muda dan

merah tua, ikon platform tiga dimensi, serta foto partisipasi berbentuk forum, sehingga isu demokrasi tampil ramah, mudah dibagikan, dan memicu afeksi ringan. Sedangkan dari analisis naratif, unggahan cenderung memuat framing diagnostik yang kuat, interaksi yang terjadi di media sosial berlangsung dalam lingkungan platform yang dikendalikan oleh algoritma, logika komersial, dan ekonomi perhatian (*attention economy*) yang dapat memengaruhi visibilitas informasi dan kualitas diskursus. Secara ideologis, ruang publik digital tidak sepenuhnya bebas dari relasi kuasa. Refigurasi tersebut ditandai oleh bergesernya pola komunikasi dari relasi yang relatif satu arah menuju komunikasi berbasis jaringan, di mana pengguna memiliki peluang untuk menjadi penerima sekaligus produsen dan penyebar wacana. Namun, proses tersebut tidak berlangsung secara sepenuhnya egaliter karena visibilitas dan sirkulasi wacana turut dipengaruhi oleh logika platform dan mekanisme algoritmik. Dengan demikian, kasus @demokrasidigital memperlihatkan bahwa ruang publik digital terbentuk melalui pertemuan antara aktor, jaringan, praktik komunikasi, dan infrastruktur platform.

Studi terhadap @demokrasidigital memperlihatkan bahwa ruang publik digital bukan sekadar ruang baru untuk berbicara tentang demokrasi, melainkan ruang tempat hubungan antarpengguna, wacana, jaringan, dan tindakan sosial dikonstruksi secara terus-menerus. Dalam konteks tersebut, batas antara komunikasi *online* dan tindakan *offline* menjadi semakin cair, sehingga aktivisme digital dapat dipahami sebagai bagian dari proses pembentukan kembali praktik komunikasi demokratis di era platform.

REFERENSI

Alexey, S. (2018). Hannah Arendt, Jurgen Habermas, and rethinking the public sphere in the age of social Media. *Социологическое обозрение*, 88-102.

Anggara, S., & Pratama, H. S. (2019). Masyarakat Jejaring, Media Sosial, dan Transformasi Ruang Publik: Refleksi Mengenai Fenomena Arab Spring dan "Teman Ahok". *Paradigma*, 287-310.

Bakhshi, S., Shamma, D. A., & Gilbert, E. (2014). Faces engage us: Photos with faces attract more likes and comments on Instagram. *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 965–974). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/2556288.2557403

Benkler, Y. (2006). *The wealth of networks: How social production transforms markets and freedom*. Yale University Press.

Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2013). *The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139198752

Bo'do, S., Siahaan, H., & Ida, R. (2019). Diskusi Media Sosial, Ruang Publik dan Gerakan Pertanian Perkotaan di Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 250-261.

Boulianne, S., Lalancette, M., & Ilkiw, D. (2020). School strike 4 climate: Social media and the international youth protest on climate change. *Media and Communication, 8*(2), 208–218. https://doi.org/10.17645/mac.v8i2.2768

Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society.* Chichester: Wiley-Blackwell.

Christmann, G. B., Knoblauch, H., & Löw, M. (Eds.). (2022). *Communicative constructions and the refiguration of spaces: Theoretical approaches and empirical studies*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780367817183

Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). *The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism*. Stanford University Press. https://doi.org/10.1515/9781503609754

Dahlgren, P. (2013). *The political web: Media, participation and alternative democracy*. Palgrave Macmillan.

Fraser, N. (2024). Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy 1. *In New Critical Writings in Political Sociology. Routledge*, 489-513.

Fuchs, C. (2014). *Social media: A critical introduction* (2nd ed.). Sage Publications.

Habermas, J. (1962). *The Structural Transformation of the Public Sphere.* Cambridge, Massachusetts : MIT Press.

Jenkins, H., Ford, S., & Green, J. (2013). *Spreadable media: Creating value and meaning in a networked culture*. New York University Press.

Kwok, C., & Chan, N. K. (2024). Human-automated collectives: Automating communication for social movement mobilization. *New Media & Society*. https://doi.org/10.1177/14614448241251794

Lengauer, D. (2018). Sharing semangat taqwa: social media and digital Islamic socialities in Bandung. *Indonesia and the Malay world*, 5-23.

Li, M., Suk, J., Zhang, Y., Pevehouse, J. C., Sun, Y., Kwon, H., Lian, R., Wang, R., Dong, X., & Shah, D. V. (2026). Platform affordances, discursive opportunities, and social media activism: A cross-platform analysis of #MeToo on Twitter, Facebook, and Reddit, 2017-2020. *New Media & Society, 28*(1), 119-147.

Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). *Encyclopedia of communication theory (Vol. 1).* California: Sage Publications.

Mendes, K., Ringrose, J., & Keller, J. (2018). #MeToo and the promise and pitfalls of challenging rape culture through digital feminist activism. *European Journal of Women's Studies, 25*(2), 236–246. https://doi.org/10.1177/1350506818765318

Mossberger, K., Tolbert, C. J., & McNeal, R. S. (2008). *Digital citizenship: The Internet, society, and participation*. MIT Press.

Papacharissi, Z. (2015). *Affective publics: Sentiment, technology, and politics*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199999736.001.0001

Robi'ah, S. N. (2020). Media Sosial sebagai Ruang Publik Virtual Bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. *Jurnal PUBLIQUE*, 21-44.

Romero, D. L. (2016). Social Media, Civic Engagement, and Local Governments: Special Consideration to the Office of the Mayor of NYC. *International Journal of Civic*

Engagement and Social Change (IJCESC), 14-24.
Sekaran, U., & Bougie, R. (2018). *Metode Penelitian untuk Bisnis.* Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Şen, A. F., & Bolumu-Elazig, İ. F. (2012). The social media as a public sphere: The rise of social opposition. *International Conference on Communication, Media, Technology and Design* (pp. 490-494). Istanbul: Retrieved from http://www. cmdconf. net/2012/makal.
Setiawan, F. R. (2023). Peran Media Sosial Sebagai Ruang Publik: Tinjauan Filosofis Gagasan Ruang Publik Jürgen Habermas. *Melintas*, 323-350.
Shirky, C. (2011). The political power of social media: Technology, the public sphere, and political change. *Foreign affairs*, 28-41.
Sunstein, C. R. (2018). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400890521
Thompson, J. B. (1995). *The Media and Modernity: A SOCIAL THEORY OF THE MEDIA.* Cambridge: Polity Press.
Tufekci, Z. (2017). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest.* New Haven: Yale University Press.
Van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). *The platform society: Public values in a connective world*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780190889760.001.0001

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest. *Copyright © Destita Mutiara dan Muhammad Hafizh Renaldi. This is an open-access article dis- tributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publica- tion in this journal is cited, in accordance with accepted aca- demic practice. No use, distribution or reproduction is permit- ted which does not comply with these terms.*